

## Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi

Ahmad Aridho<sup>1</sup> Ture Ayu Situmeang<sup>2</sup> Dewi Romantika Tinambunan<sup>3</sup> Kania Nova  
Ramadhani<sup>4</sup> Murni Wati Lase<sup>5</sup> Julia Ivanna<sup>6</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id](mailto:ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup> [turesyu99@gmail.com](mailto:turesyu99@gmail.com)<sup>2</sup>  
[romantikadewi7@gmail.com](mailto:romantikadewi7@gmail.com)<sup>3</sup> [kanianovaramadani@gmail.com](mailto:kanianovaramadani@gmail.com)<sup>4</sup>  
[murniwatilase60@gmail.com](mailto:murniwatilase60@gmail.com)<sup>5</sup> [juliaivanna@unimed.ac.id](mailto:juliaivanna@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah system pemerintahan yang dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1967, memberikan pengertian demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintah harus selalu menyertakan rakyat dan mendengar aspirasi dari rakyat. Para pemimpin tidak diangkat oleh pejabat maupun badan-badan lain negara, tetapi langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dalam kurun waktu dan periode tertentu sesuai amanat konstitusi Republik Indonesia. Dalam menyampaikan opini pada masa sekarang ini dianggap bukan lagi hal yang sulit. Kemajuan dan perkembangan teknologi menjadi satu kekuatan besar dalam pembentukan opini public. Saluran komunikasi merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam konteks komunikasi politik (Siagian, 2015). Salah satu saluran komunikasi tersebut adalah melalui media massa. Media massa sebagai sarana pemberian informasi memiliki peran penting dalam penyebaran isu-isu yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian

**Kata Kunci:** Demokrasi, Media Massa, Teknologi, Opini Publik, Pasca Reformasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Demokrasi. Yang artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu tercantum dengan sangat jelas dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945. Runtuhnya rezim Orde baru pada tahun 1998 telah membawa warna baru dan harapan yang baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Munculnya Era Reformasi menjadi tanda bagi dimulainya tahapan awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Prinsip dasar dari sebuah demokrasi yaitu bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal, prinsip tersebut sesuai dengan karakter manusia sebagai homo-social (Poti, 2011). Demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah system pemerintahan yang dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1967, memberikan pengertian demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintah harus selalu menyertakan rakyat dan mendengar aspirasi dari rakyat. Para pemimpin tidak diangkat oleh pejabat maupun badan-badan lain negara, tetapi langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum yang diselenggarakan dalam kurun waktu dan periode tertentu sesuai amanat konstitusi Republik Indonesia. Dalam negara demokrasi, hal yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan adalah tentang penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri telah menjamin hak-hak tersebut di dalam

konstitusi negara. Salah satu hak asasi yang diatur didalamnya adalah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Dari isi tersebut dapat dimaknai bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan suara dan opini public. Masyarakat memiliki tugas sebagai control dalam politik. Salah satu wujud peran serta masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap politik adalah dengan melalui penyampaian opini public. Opini public dapat diartikan sebagai sebuah proses yang merupakan gabungan dari pikiran, perasaan, dan gagasan berupa usulan yang diungkapkan oleh warga negara terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Opini tersebut dapat mengandung konflik, bantahan, dan perselisihan-perselisihan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Opini publik identik dengan kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, serta kritik yang membangun. Singkatnya opini public dapat dipahami sebagai sebuah ungkapan dan tanggapan yang diberikan oleh warga negara terhadap berbagai kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Dalam menyampaikan opini pada masa sekarang ini dianggap bukan lagi hal yang sulit. Kemajuan dan perkembangan teknologi menjadi satu kekuatan besar dalam pembentukan opini public. Saluran komunikasi merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam konteks komunikasi politik (Siagian, 2015). Salah satu saluran komunikasi tersebut adalah melalui media massa. Media massa sebagai sarana pemberian informasi memiliki peran penting dalam penyebaran isu-isu yang berkembang di masyarakat. Lebih khususnya media massa memiliki kekuatan dalam penyebaran opini publik atau public opinion (Puspianto, 2022).

Media sebagai pilar ke empat demokrasi, setelah legislative, eksekutif dan yudikatif, merupakan hal yang terus di kumandangkan oleh penggiat-penggiat politik maupun media. Pasca tragedi 1998 hiruk pikuk menjamurnya Lembaga-lembaga penyiaran menjadi salah satu dimulainya babak baru bagi perkembangan arus informasi dari lembaga-lembaga penyiaran sebagai konsekuensi perkembangan demokrasi di Indonesia (Slamet, 2016). Ruang media massa termasuk didalamnya televisi, radio, surat kabar, social media dan lainnya saat ini cenderung menjadi arena pertarungan di antara pemilik kekuatan ekonomi, politik maupun budaya. Orang-orang yang berkedudukan sebagai elit politik dan memiliki kepentingan pada kekuasaan tentu membutuhkan massa yang menjadi unsur penting dalam mencapai tujuannya (Trijayanto, 2015). Tujuan tersebut diacapai tentunya dengan memberikan suatu tindakan yang dapat memberikan efek berupa respon positif masyarakat sehingga respon tersebut kemudian dapat menjadi dukungan bagi para elit politik. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan di media massa tersebut dapat menjadi salah satu pemicu terhadap munculnya opini-opini masyarakat. Tindakan yang dilakuakn baik dari segi kampanye, pembuatan peraturan dan kebijakan, serta pelaksanaannya tentunya tidak akan lepas dari pengawasan public. Masyarakat sebagai pemegang fungsi control melalui media masaa dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas. Namun kebebasan yang bagaimanakah yang dimaksud dalam hal ini ? pembatasan terhadap ruang public juga semakin terasa, bahkan kadang kala Kritik tajam dianggap sebagai penghinaan terhadap pemegang kuasa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Referensi dalam pengumpulan data digunakan metode untuk mencari dan menyusun sumber dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan. Bahan bibliografi yang diperoleh dari berbagai referensi telah dianalisis

secara kritis dan harus dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung tesis atau gagasan. Dalam penelitian kepustakaan, data penelitian dikumpulkan dalam bentuk data kepustakaan, yang mana diseleksi, diambil, disajikan, dan dianalisis. Sumber data penelitian ini adalah data pustaka yang isinya memerlukan pengolahan filosofis dan teoretis sebanyak tindakan. Studi kepustakaan disini merupakan studi kepustakaan tanpa adanya pengujian empiris (Muhadjir, 1998:159).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh rakyat. Menurut Adam Przeworski, proses pendirian demokrasi sebenarnya adalah sebuah proses menginstitutionalisasi ketidakpastian dan menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Menurut Samuel P. Huntington, pada tingkatan paling sederhana, demokratisasi harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter; (2) dibangunnya sebuah rezim yang demokratis; (3) dilakukan pengkonsolidasian rezim demokratis itu. Tahapan-tahapan dalam transisi menuju demokrasi menurut Georg Sorensen ada tiga, yaitu: pertama, tahapan persiapan, pada tahapan ini ditandai dengan perjuangan politik yang bergerak untuk menghancurkan rezim nondemokratis. Kedua, tahapan keputusan, yang ditandai dengan telah terwujudnya elemen yang jelas dari tertib demokrasi. Ketiga, tahapan konsolidasi, dalam tahapan ini demokrasi baru lebih berkembang, sehingga praktek-praktek demokrasi menjadi bagian dari budaya politik.

Politik sangat berhubungan erat dengan media massa, karena salah satu tujuan media massa yakni untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai hal, terutama hal politik. Ketika pendapat umum tersebut dapat ter 'set' seperti yang diinginkan media massa, pada saat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu media massa. Antara dunia politik atau politik praktis dengan media massa terjalin hubungan yang saling membutuhkan dan bahkan saling mempengaruhi. Media massa dengan fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum dan mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Merrill dan Lowenstein mengungkapkan bahwa media massa (surat kabar) tunduk pada sistem pers, dan sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. Artinya, dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau dalam penyampaian pesan, surat kabar harus berada dalam lingkaran regulasi yang ditetapkan.

Media massa sekarang ini telah masuk dalam arus globalisasi yang mana media massa bersifat universal dan tiada mengenal batas wilayah dan hukum suatu negara. Jenis dan fungsinya juga semakin canggih sehubungan dengan perkembangan arus modernisasi dan teknologi pada masa kini. Media sebaran sudah dianggap sesuatu yang lazim yang selaras dengan kemajuan masyarakat manusia modern (Spark, 2000, Chan, 2001). Media massa dapat diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak terdiri daripada sumber bertulis seperti surat kabar, majalah, buku dan bahan percetakan yang lain, sedangkan media elektronik pula terdiri daripada televisi, radio, internet blog, telefon seluler dan sebagainya. Salah satu bentuk media massa yang paling dominan sekaligus memiliki kekhasan, adalah media penyiaran, khususnya televisi. Penyiaran menggunakan ranah publik, yaitu frekuensi yang jumlahnya terbatas, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan media cetak.

## **Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik**

Media Massa memiliki peran yang sangat penting dalam politik, terutama dalam menyebarkan pesan politik kepada masyarakat luas. Massa media memiliki keunggulan dalam menjangkau khalayak secara masif dan dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Massa media juga mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan membentuk

citra dunia mereka. Dalam konteks komunikasi politik, media massa juga memainkan peran penting dalam memobilisasi dan mentransmisikan pesan politik antara institusi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, massa media juga mempengaruhi isi pesan politik melalui faktor-faktor seperti pengaruh pekerja media, organisasi media, ekstramedia, dan ideologi Menurut Nurul Shobah, dalam "Peran Media Massa," media massa memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman dan perilaku politik masyarakat, terutama di era reformasi. Massa media juga mempengaruhi perilaku politik masyarakat melalui publikasi yang memberitakan transformasi politik dan memiliki kebebasan berekspresi dalam pemberitaannya. Kontribusi massa media terhadap konstruk kesadaran, pemahaman, dan perilaku politik masyarakat sangat signifikan. Dalam melakukan komunikasi politik, media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik, membentuk kesadaran politik masyarakat, dan mempengaruhi perilaku politik. Media massa juga memainkan peran dalam memobilisasi pesan politik dari pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa. Oleh karena itu, media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang paling penting dalam konteks komunikasi politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa massa media mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam politik, terutama dalam menyebarkan pesan politik, membentuk kesadaran politik masyarakat, dan mempengaruhi perilaku politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam memobilisasi pesan politik dari pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa.

## **KESIMPULAN**

Indonesia merupakan negara Demokrasi. Yang artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu tercantum dengan sangat jelas dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945. Runtuhnya rezim Orde baru pada tahun 1998 telah membawa warna baru dan harapan yang baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Munculnya Era Reformasi menjadi tanda bagi dimulainya tahapan awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Prinsip dasar dari sebuah demokrasi yaitu bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal, prinsip tersebut sesuai dengan karakter manusia sebagai homo-social (Poti, 2011). Media massa, dalam segala bentuknya, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan menyampaikan opini publik. Sebagai platform yang mencakup berbagai jenis media, termasuk surat kabar, televisi, radio, dan media online, media massa berfungsi sebagai jembatan antara individu dan informasi serta merupakan salah satu instrumen utama dalam membentuk pandangan dan opini masyarakat.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara luas di berbagai negara dan masyarakat. Pengakuan terhadap hak ini mencerminkan esensi kemanusiaan, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, pandangan, atau opini tanpa takut akan penindasan atau pembatasan yang tidak adil. Media massa juga memainkan peran dalam memobilisasi pesan politik dari pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa. Oleh karena itu, media massa merupakan salah satu saluran komunikasi yang paling penting dalam konteks komunikasi politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa massa media mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam politik, terutama dalam menyebarkan pesan politik, membentuk kesadaran politik masyarakat, dan mempengaruhi perilaku politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam memobilisasi pesan politik dari pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Herdiansyah Amanu, L. (2021, Januari). Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Balayudha*, vol.no 1, 01-08.

- Poti, J. (2011). Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*.
- Puspianto, A. (2022). Media Massa dan Pembentukan Opini Publik (Kajian Agenda Setting Theory). *Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Siagian, H. F. (2015). Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Al-Khitabah*.
- Slamet, A. (2016). Media Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 119.
- Trijayanto, D. (2015). Relasi Antara Opini Publik dan Media Massa (Pembentukan Opini Publik melalui Iklan Politik di MNC dan Metro TV). *PROMEDIA*.